



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul	: Peran Pupuk Melawan Rezim Impor Beras
Tanggal	: Selasa, 13 Juli 2021
Surat Kabar	: Rakyat Merdeka
Halaman	: 7

Peran Pupuk Melawan Rezim Impor Beras

Oleh: Prof. Tjipta Lesmana
Pengamat Ketahanan Pangan

ANGGOTA Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin, 10 Juli yang lalu lalu mengingatkan janji Presiden Jokowi beberapa waktu yang lalu bahwa pemerintah tidak akan mengimpor beras dan tidak akan menaikkan PPN Beras. Janji Presiden muncul karena Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi sebelumnya mengatakan, pemerintah akan impor beras lagi sebanyak 1 juta ton dari Thailand. MoU antara kedua pemerintah sudah ditandatangan. Pernyataan menteri yang baru menjabat 3 bulan (waktu itu) menimbulkan realksi keras dari berbagai elemen masyarakat. Karena sebelumnya, pemerintah berkoar-koar, stok beras hingga akhir 2020 aman, bahkan menumpuk. Sisa impor 2 juta sebenarnya pun masih ada di gudang. Apalagi Maret-April-Mei 2021 diprediksi bakal panen raya lagi.

Mendapat kritik yang begitu keras, Lutfi buru-buru mengoreksi pernyataannya sebelumnya. Kalau pun impor beras lagi, dilakukan setelah bulan Juni 2021. Maka, Presiden Jokowi pun cepat-cepat menegaskan kembali apa yang dikatakan oleh Lutfi.

Andi Akmal dari Komisi IV DPR-RI merasa perlu mengingatkan janji pemerintah tidak akan impor beras karena "Kami sudah sering mendapati janji-janji seperti ini. Harapannya

dapat ditepati, karena langka sekali pemerintah menelepas janji terutama persoalan importasi beras!" cukup keras sindir/kritik Akmal dalam siaran persnya 10 Juli yang lalu.

Saya sepenuhnya mendukung sikap Andi Akmal. Di masa lalu, tangan pemerintah, terutama Kementerian Perdagangan sering "gatal" untuk impor beras dengan beragam alasan bikinan Maklum, semua orang tahu dagang beras impor dari Thailand atau Vietnam bisa mengantongi "cuan" menggiurkan. Pesisir Sungai Mekong sepanjang puluhan kilometer menjadi "ladang emas" bagi pemerintah untuk menanamkan padi dalam jumlah besar. Jadi Vietnam negara produsen beras terbesar di Asia Tenggara, harganya pun bisa ditekan murah. Di Thailand, harga beras dikontrol oleh keluarga Raja. Siapa pun tidak berani pihak yang berteriak stock beras kian berkurang karena, antara lain, dipakai untuk "donasi" kepada 15 juta keluarga miskin.

Saat ini, dari 56,6 juta keluarga di negara kita, 5 juta KK tergolong miskin. Ditambah keluarga "hampir miskin" sebanyak 10 juta KK. Maka, total keluarga yang eligible untuk memperoleh beras gratis dari pemerintah (terkait pandemi Covid-19) berjumlah 15 juta KK. Presiden Jokowi sudah perintahkan Menteri Sosial, Ibu Risma untuk memberikan 10 kg beras disampaikan warga tunai Rp 600.000,- kepada setiap keluarga pra-sejahtera.

Dengan hitungan sederhana, 15 juta dikali 10 kg sama dengan



150 juta kg, atau 150.000 ton. Artinya, total beras untuk keluarga miskin yang dikurangkan pemerintah kepada keluarga bersangkutan yang dimulai minggu ini, mencapai minimal 150.000 ton. Jangan sampai nanti ada pihak yang berteriak stock beras kian berkurang karena, antara lain, dipakai untuk "donasi" kepada 15 juta keluarga miskin. Oleh sebab itu, kita perlu impor beras sebagai cadangan, belum lagi kalau pandemi corona yang bertambah mengeringkan karenanya "sumbangan" varian Delta bakal berkepanjangan sebagaimana diantisipasi oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Namun, hingga akhir Juni 2021 kita memiliki surplus beras sebanyak 10,29 juta ton. Panen berdasarkan mana-mana masih berlangsung.

Menteri Pertanian, Syahrul

Yasin Limpo, pekan lalu, juga menegaskan pemerintah tidak akan impor beras, karena stok lebih dari cukup dan di berbagai daerah masih panen beras yang kecuali beras premium yang jumlahnya sedikit.

Kecuali kerap ada tanggangan nakal yang selalu "ngebet" untuk impor beras demi vested-interest mereka, melawan regim impor beras tentu bergantung juga pada beragam faktor, saat diantaranya adalah faktor ketersediaan pupuk dengan harga yang memadai dan terjangkau oleh sebagian besar petani kita.

Soal pupuk, sampai sekarang masih sering ada "mara-suara bisnis", misalnya tudungan subsidi yang terlalu besar hingga puluhan triliun rupiah tiap tahun, distribusi yang kerap terjadi ketimpangan, kelangkaan pupuk di Japangan dan sebagainya. Ketika masih menjabat Wakil Presiden sekitar 3 tahun yang lalu, Yusuf Kalla pernah melontarkan unek-uneknya kepada masyarakat, daripada pusing-pusing mengurus pupuk yang kompleks, sebaiknya subsidi pupuk dibahas saja, uangnya diberikan langsung kepada petani. Biar petani yang mengatur sendiri pembelian pupuk yang dibutuhkan. Selesai. Tentu persoalan pupuk tidak sesederhana itu. Jika subsidi pupuk dicabut, dan petani langsung diberikan anggaran subsidi pupuk, segudang permasalahan bakal timbul!

Banyak orang jika dengar

wacana "subsidi pupuk", perspsi yang muncul: perusahaan pupuk meraup untung besar. Sebaliknya, yang tekor adalah pemerintah.

Pengkritik masalah pupuk bersubsidi juga mempertanyaikan (1) tadinya jaminan akses terhadap pupuk bersubsidi, (2) masih banyak petani yang sama sekali tidak memperoleh pupuk bersubsidi, (3) penggunaan pupuk subsidi masih rendah dan bervariasi; (4) distribusi pupuk subsidi yang disinyalir belum adil dan belum merata, punya lemah terfokus di propinsi tertentu.

Sekitar 3 tahun yang lalu, RRI pernah menggelar diskusi tentang persoalan pupuk, mengungkapkan seorang anggota DPR dan petinggi PT Pupuk Indonesia, sebagai narasumbernya. Pada sesi tanya-jawab, cukup banyak pendengar yang bertanya, melontarkan unek-unek sekitar pupuk. Yang paling banyak "digugat" petani menyatakan masalah kelangkaan pupuk dan kesulitan mendapatkan pupuk subsidi yang mereka butuhkan.

Menyangkut soal kelangkaan pupuk yang sering disuarakan oleh kelompok tani, jika kita amati secara teliti, penyebab pokoknya karena terjadinya GAP (kesenjangan) antara perencanaan pupuk (e-RDKK) dan Operasi penyaluran pupuk. Dalam perencanaan (tercantum di e-RDKK) dan operasi penyaluran pupuk yang dibutuhkan sekitar 15.264.933 ton pupuk.

disusun oleh Kementerian Pertanian dan petani, total pupuk yang dibutuhkan 24,3 juta ton;

sedangkan yang disalurkan oleh PT PI sebagai operator hanya 9,04 juta ton; terjadi selisih sebesar 15.264.933 ton pupuk.

RDKK awalnya disusun oleh kelompok petani yang disetujui oleh Lurah dan Petugas Penyuluhan Lapangan (PPL). Hasil perencanaan itu direkap di Kecamatan, kemudian naik ke tingkat Kabupaten, terakhir di tingkat Propinsi. Dari sini, Direktor Pupuk dan Pestisida Kementerian menyusun kebutuhan pupuk berdasarkan rekap e-RDKK Propinsi. Kementerian kemudian menetapkan Alokasi Pupuk Subsidi (urea, SP 36, ZA, NPK dkk). Setelah RDKK final, maka ditetapkan rancahang Alokasi Pupuk subsidi yang dimintakan perstujuannya pada Kementerian Keuangan untuk dibahas dan disetujui oleh DPR, maka angka alokasi pupuk tahun anggaran yang sudah disetujui DPR dikirim ke PT Pupuk Indonesia (PI) selaku Operator Penyaluran. Untuk tahun anggaran 2021, jumlah pupuk yang tercantum dalam e-RDKK dan disetujui pemerintah berjumlah 9,04 juta ton. Kenapa dari perencanaan kebutuhan pupuk sebesar 24,3 juta ton "dicutuk" jadi 9,04 juta ton?

Tentang kemampuan 5 anak perusahaan PT PI untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional, tampaknya tidak pernah ada masalah; dalam arti selalu over-production. Beberapa tahun terakhir Indonesia halilkin sudah mengekspor pupuk ke beberapa negara. Produksi pupuk Indonesia tahun lalu 20,26 juta ton; sedangkan kebutuhan pupuk subsidi sekitar 9 juta ton. ■

Jika analisis di atas dicermati betul-betul, maka logis kalau selalu terjadi kelangkaan pupuk (subsidi) di kalangan petani. Wong, kebutuhan pupuk subsidi 24,3 juta ton, tapi yang direalisasi untuk didistribusikan oleh PT PI hanya 9,04 juta ton. Kelompok tan yang tidak terdaftar namanya dalam e-RDKK ini tidak mau harus membeli pupuk kebutuhan mereka dengan harga normal yang cukup signifikan selisihnya dengan harga pupuk bersubsidi.

Gap lebar antara perencanaan kebutuhan pupuk dan jumlah pupuk yang disetujui pemerintah (bersama DPR), itulah tantangan sekaligus masalah pokok pupuk subsidi sampai sekarang!

Tentang kemampuan 5 anak perusahaan PT PI untuk memenuhi kebutuhan pupuk nasional, tampaknya tidak pernah ada masalah; dalam arti selalu over-production. Beberapa tahun terakhir Indonesia halilkin sudah mengekspor pupuk ke beberapa negara. Produksi pupuk Indonesia tahun lalu 20,26 juta ton; sedangkan kebutuhan pupuk subsidi sekitar 9 juta ton. ■